



# Analisis kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Studi: Kabupaten Kerinci

Hudmi<sup>1</sup>, Rahmadani Yusran<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang, Indonesia

Correspondence E-mail: [hudmi271990@gmail.com](mailto:hudmi271990@gmail.com)

[yusranrdy@fis.unp.ac.id](mailto:yusranrdy@fis.unp.ac.id)

## ABSTRAK

Permasalahan sampah rumah tangga menjadi isu krusial di Kabupaten Kerinci, meskipun Pemerintah daerah telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur pengelolaannya. Keberadaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah belum sepenuhnya menjawab persoalan sampah di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara tujuan kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan yang berlangsung di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Kerinci dengan menelusuri tahapan perencanaan, pengumpulan, pengangkutan dan penanganan sampah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi dengan informan yang dipilih secara purposive sampling, terdiri dari aparaturnya dinas lingkungan hidup, kecamatan, desa dan masyarakat. Data diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi nyata pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Kerinci.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Kerinci belum berjalan secara optimal dari tahap perencanaan, pengumpulan, aspek pengangkutan, hingga tahap penanganan, pengelolaan sampah masih didominasi pola pembuangan ke TPA tanpa pemilihan dan pengolahan sehingga pendekatan 3R belum optimal.

## Article Information

### Riwayat Artikel:

Diterima 26 November 2025

Direvisi 25 Desember 2025

Diterbitkan 29 Desember 2025

Tersedia Online 29 Desember

2025

Publikasi 29 Desember 2025

### Keyword:

*Implementasi Kebijakan,  
Pengelolaan Sampah Rumah  
Tangga, pelayanan publik.*

## 1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat, volume timbunan sampah terus meningkat dan memberikan tekanan besar terhadap kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan (BRIN, 2024). Salah satu penyumbang sampah terbesar di Indonesia yaitu sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga merupakan segala jenis material yang sudah tidak berfungsi dan dibuang oleh rumah tangga berupa kertas, plastik, kaca dan logam (Dwi Kurniawati, 2024). Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di tahun 2023, ada 60,44% sampah berasal dari aktivitas rumah tangga dari total keseluruhan sampah di Indonesia. Ketidakmampuan tata kelola sampah dalam merespons peningkatan tersebut tidak sekedar mempengaruhi penurunan kualitas ekosistem sekitar, tetapi juga berimplikasi terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Sampah rumah tangga yang tidak dikelola secara baik dapat mencemari air dan tanah serta menimbulkan ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan sektor pertanian akibat dominasi sampah organik, plastik, dan elektronik (Ajeng Putri Utami, 2023). Temuan ini diperkuat oleh hasil survei Kementerian Kesehatan yang menunjukkan bahwa sekitar 62% rumah tangga di Indonesia masih mengelola sampah secara tidak layak, antara lain dengan cara dibakar atau dibuang sembarangan ke sungai, saluran drainase, dan ke laut (Kemenkes, 2025). Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, isu pengelolaan sampah rumah tangga menempati posisi strategis dalam penyelenggaraan layanan publik di Indonesia.

Peran pemerintah sangat krusial dalam pengelolaan sampah, terutama sampah rumah tangga yang mendominasi sampah terbesar di Indonesia. Kontribusi pemerintah terhadap pengelolaan sampah rumah tangga mencakup penetapan kebijakan, strategi dan program pengelolaan sampah (UU NO.18 Tahun 2008) serta memberikan insentif kepada masyarakat yang terlibat secara aktif (Dwi Kurniawati, 2024). Danya kerangka regulasi yang tegas diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan sampah rumah tangga yang sistematis dan berorientasi keberlanjutan (Maghfiro, 2013).

Skala Nasional tahapan penyelenggaraan pengelolaan sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Regulasi ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi Nasional yang pengelolaan sampah yang menargetkan pengurangan dan penanganan sampah secara sistematis dan terukur. Ketentuan undang-undang ini menjadi acuan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun peraturan dan kebijakan lanjutan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayah setempat.

Secara Normatif, kabupaten Kerinci telah menyediakan berbagai regulasi yang berfungsi sebagai dasar pengelolaan sampah rumah tangga yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah; Peraturan Bupati Kerinci Nomor 42 Tahun 2018 mengenai Kebijakan dan Strategi Kabupaten Kerinci dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Peraturan Bupati Kerinci Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci; serta Keputusan Bupati Kerinci Nomor 100.3.3.2/KEP.133/2025 tentang Penetapan Kecamatan Penerima Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2025.

Namun, dalam praktiknya permasalahan sampah di Kabupaten Kerinci masih terus berlangsung dan cenderung meningkat. Keberadaan kerangka regulasi yang komprehensif

tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh keberhasilan implementasi di tingkat daerah. Situasi ini mencerminkan adanya jarak antara sasaran kebijakan yang dirumuskan dalam peraturan daerah dan realisasi implementasinya di lapangan. Persoalan utama dalam pengelolaan sampah di Indonesia bukan disebabkan karena tidak adanya regulasi namun karena lemahnya implementasi kebijakan di tingkat lokal (Munandar, 2024).

Studi terdahulu terkait kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas dan keberlanjutan program yang telah dirancang. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain rendahnya kesadaran kolektif, keterbatasan sarana pendukung, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta (Saputra, 2025). Penelitian lain juga dilakukan (Nor, 2024) mengindikasikan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga masih belum berjalan secara optimal akibat keterbatasan fasilitas pendukung serta rendahnya kesadaran masyarakat.

Dalam konteks masyarakat Kabupaten Kerinci Ketidakterhasilan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga ditandai oleh berbagai persoalan mendasar. Fragmentasi kelembagaan dan lemahnya koordinasi lintas sektor antara perangkat daerah, kecamatan, dan desa menyebabkan program pengelolaan sampah berjalan secara parsial dan tidak terintegrasi. Selain itu, regulasi teknis yang mengatur tahapan pengelolaan sampah belum sepenuhnya diterapkan di lapangan, sehingga pengelolaan masih berfokus pada pengumpulan dan pengangkutan tanpa didukung pemilahan dan pengolahan yang memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, seperti minimnya TPS dan ketergantungan pada TPA, semakin memperburuk efektivitas kebijakan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, rendahnya partisipasi masyarakat serta resistensi terhadap fasilitas pengelolaan sampah menunjukkan bahwa aspek komunikasi kebijakan dan edukasi publik belum berjalan optimal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah belum mampu membangun dukungan dan keterlibatan masyarakat sebagai aktor penting dalam implementasi kebijakan. Dampaknya, sasaran kebijakan untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan masih belum terealisasi.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis Dinamika implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di kabupaten kerinci. Penelitian ini mengungkap faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan serta menganalisis kesenjangan antara regulasi yang diciptakan dengan aplikasi di lapangan. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dan rekomendasi kebijakan sebagai bentuk evaluasi regulasi yang sudah ada sebelumnya.

## 2. METODE

Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan sebagai metode dalam penelitian ini. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai faktor-faktor yang menyebabkan belum berhasilnya pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Kerinci. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya menggali realitas empiris implementasi kebijakan sebagaimana terjadi di lapangan, khususnya terkait aspek kelembagaan, koordinasi lintas sektor, ketersediaan sarana prasarana, serta respons dan partisipasi masyarakat.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Kerinci, khususnya di Kecamatan Danau kerinci Barat pada tahun 2025, dengan fokus pada instansi dan wilayah yang terlibat langsung dalam pengelolaan sampah. Penentuan informan penelitian dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, meliputi pejabat Dinas Lingkungan Hidup, camat menerima pelimpahan

kewenangan, perangkat desa/kelurahan, serta tokoh masyarakat yang memahami praktik pengelolaan sampah di lapangan. Penetapan informan bertujuan menghasilkan informasi yang relevan dan representatif tentang dinamika implementasi kebijakan di lapangan.

Data penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara yang mendalam serta observasi langsung terhadap praktik pengelolaan sampah, seperti kondisi TPS, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah, serta perilaku masyarakat. Adapun data sekunder dikumpulkan dengan menelaah berbagai dokumen meliputi, peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan daerah, laporan instansi terkait, publikasi ilmiah, dan data statistik yang sesuai dengan pengelolaan sampah. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan konsistensi, kredibilitas, dan akuntabilitas temuan penelitian. Seluruh data yang diperoleh dianalisis melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengacu pada kerangka analisis Miles dan Huberman, yang meliputi proses pengolahan data sejak tahap pengumpulan, penyederhanaan data, penyajian temuan, hingga perumusan kesimpulan. Melalui tahapan analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi secara sistematis faktor-faktor utama yang menyebabkan regulasi pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Kerinci menghadapi kendala dalam pelaksanaannya.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Kerinci**

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2013 pasal 6 mengatur delapan aspek penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga yaitu perencanaan, pelaksanaan, penanganan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan. Regulasi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan sampah tidak bisa dipahami hanya sebagai kegiatan teknis melainkan sebuah sistem kebijakan yang menuntut keterpaduan antar proses dan konsistensi implikasi di lapangan. Namun temuan lapangan menunjukkan sebagian besar ketentuan tersebut belum diimplementasikan secara optimal dan berkesinambungan, sekalipun ketentuan normatifnya telah tercantum secara jelas dalam regulasi dan kebijakan daerah yang berlaku di daerah.

Pada tahap perencanaan, pengelolaan sampah di Kabupaten Kerinci telah ditautkan dalam berbagai dokumen perencanaan daerah. Namun perencanaan tersebut cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya terintegrasi dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Suatu kebijakan akan efektif bila melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai level pemerintahan dan masyarakat (Syahril Ramadhan, 2024). Selain itu, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan sampah lebih berfokus di daerah perkotaan sedangkan daerah pedesaan belum terakomodasi secara menyeluruh. Dalam praktiknya, masih banyak desa yang belum memiliki rencana kerja pengelolaan sampah secara mandiri karena keterbatasan panduan dan dukungan dari pemerintah daerah dan hanya mengandalkan petugas dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang datang secara berkala. Kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan kebijakan tidak berjalan merata di seluruh wilayah dan bukan menggambarkan sebagai layanan publik yang terencana dan berkelanjutan.

Tahap pelaksanaan pengelolaan sampah di inisiasi dengan melakukan melalui 3R Pada aspek *Reduce*, bahwa pengurangan timbulan sampah dari sumber melalui perubahan perilaku konsumsi. Upaya ini tampak dalam sosialisasi pengurangan plastik sekali pakai, ajakan

membawa tas belanja guna ulang, mengurangi pembelian barang sekali pakai, dan pengolahan sampah dapur menjadi kompos. Pada aspek *Recycle* (Daur Ulang), adalah bahwa daur ulang sudah dilakukan di Kabupaten Kerinci melalui keberadaan bank sampah, TPS3R (Bumi Jaya, Batang Sagir, Girimulyo, Siulak Mukai), serta praktik daur ulang kreatif (*upcycling*) seperti anyaman tas dari bungkus minuman/jajanan. Namun dalam implikasinya tahapan pelaksanaan belum bisa berjalan optimal terutama yang terkait dengan volume sampah yang dihasilkan masyarakat dan kapasitas ketersediaan sarana dan prasarana serta anggaran sehingga dalam pelaksanaannya kurang maksimal dalam menjalankan sesuai dengan perda dan juga perbud.

Tahap penanganan sampah yang seharusnya berorientasi pada pencegahan dampak lingkungan, estetika dan kesehatan masyarakat (Fadzoli, 2023) juga belum berjalan optimal. Temuan penelitian menunjukkan sebagian besar sampah rumah tangga masih ditangani dengan cara konvensional, yaitu dikumpulkan lalu dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa mekanisme pemilahan dan pengolahan yang dilakukan sejak tahap awal. Disisi lain tahapan pemilahan sampah yang menjadi tahapan penting dalam pengelolaan sampah berkelanjutan (Leny Julia Lingga, 2024) belum dilaksanakan secara konsisten bahkan di tingkat rumah tangga. Belum ada pelatihan atau fasilitas pengomposan di tingkat kecamatan. Selain itu, belum ada sistem penanganan sampah terpadu di wilayah menjadi faktor utama yang menghambat tahapan pemilahan sampah sehingga sebagian besar sampah tercampur sejak dari sumbernya.

Kondisi tersebut berdampak secara langsung pada tahapan pengumpulan dan pengangkutan. Pengumpulan sampah menjadi tahapan krusial dalam sistem pengelolaan sampah rumah tangga (Purtanto, 2023) agar mencegah pencemaran lingkungan, mendukung kebersihan dan kesehatan lingkungan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, dan memberikan nilai ekonomi pada sampah, serta mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) (Sidiq, 2020). Temuan penelitian menunjukkan bahwa layanan pengumpulan sampah belum menjangkau semua wilayah dan belum bersifat rutin terutama pemukiman yang jauh dari pusat kota walaupun telah dirancang dalam rencana kerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kerinci. Keterbatasan armada pengangkut sampah dan jadwal operasional yang tidak konsisten mengakibatkan penumpukan volume sampah di tempat penampungan sementara. Selanjutnya, proses pengolahan sampah yang bertujuan mengurangi volume sebelum pemrosesan akhir belum berjalan secara efektif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberadaan unit pengolahan dan pengelolaan sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R) juga belum terealisasi, sehingga sistem pengelolaan sampah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pengelolaan berkelanjutan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara keseluruhan delapan tahap pengelolaan sampah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor Nomor 9 Tahun 2013 pasal 6 belum berjalan optimal. Hal ini menunjukkan adanya persoalan yang serius pada tahapan implementasi kebijakan. Artinya belum optimalnya pengelolaan sampah bukan disebabkan karena tidak adanya regulasi namun karena keterbatasan kapasitas pelaksana, lemahnya koordinasi antar aktor yang berperan serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Pelayanan Publik yang berkualitas tidak tercapai apabila implementasi hanya mementingkan prosedural tanpa memperhatikan konteks dilapangan (Addawiyah Addawiyah, 2022). Temuan penelitian ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan pengelolaan limbah domestik rumah tangga

di Kabupaten Kerinci sangat bergantung pada kemampuan koordinasi pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam menerjemahkan norma kebijakan dalam praktik yang konsisten dan berkelanjutan di lapangan. Temuan penelitian ini didukung oleh (Donald S. Van Meter, 1975) bahwa Implementasi kebijakan merupakan wadah interaksi antara aktor yang membuat kebijakan, sumber daya yang tersedia, struktur birokrasi dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, ketidakterpenuhinya salah satu unsur tersebut dapat berdampak pada terhambatnya implementasi kebijakan. Dalam konteks Kabupaten Kerinci, kelemahan terletak pada aspek sumber daya dan koordinasi birokrasi yang berkontribusi terhadap tidak optimalnya implikasi delapan tahapan pengelolaan sampah rumah tangga yang sudah di atur.

#### 4. PENUTUP

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Kerinci hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang optimal, meskipun perangkat regulasi di tingkat daerah telah tersedia. Delapan tahapan pengelolaan sampah yang dirancang secara sistematis mulai dari perencanaan hingga pemrosesan akhir belum dijalankan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dan keterlibatan lembaga lokal juga masih rendah, sehingga belum maksimal terbangunnya kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kondisi ini menggambarkan bahwa adanya kesenjangan antara perencanaan kebijakan dengan realitas implementasi di lapangan. Oleh karena itu, upaya perbaikan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Kerinci memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi antar aktor yang terlibat dalam kebijakan serta strategi pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis tersebut, implikasi kebijakan yang dapat dirumuskan adalah perlunya penguatan implementasi pengelolaan sampah rumah tangga melalui pelibatan seluruh pemangku kepentingan secara lebih aktif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu partisipasi aktif masyarakat perlu digalakkan lebih lanjut melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi berkelanjutan agar setiap tahapan pengelolaan sampah bisa berjalan sistematis dan terintegrasi sesuai dengan regulasi yang ada.

#### 5. REFERENSI

- Addawiyah Addawiyah, L. F. (2022). Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Responsif: Tinjauan Teoritis dan Empiris. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik, Humaniora*, 27-35.
- Ajeng Putri Utami, N. N. (2023). Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup. *Cross-Border*, 1107-1112.
- Donald S. Van Meter, C. E. (1975). The Policy Implementation Process A Conceptual Framework. *ADMINISTRATION & SOCIETY*.
- Dwi Kurniawati, F. K. (2024). Pengelolaan Limbah Sampah Rumah Tangga Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup. *JWIKAL: JURNAL WILAYAH, KOTA DAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN*, 72-83.
- Fadzoli, T. R. (2023). Dampak kebijakan pengelolaan sampah sebagai parameter kinerja pemerintah dalam bidang lingkungan hidup. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan*

*Administrasi Negara*, 28-36.

- Leny Julia Lingga, M. Y. (2024). Sampah di Indonesia: Tantangan dan Solusi Menuju Perubahan Positif. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 2235-12247.
- Maghfiro, I. (2013). Analisis Peran Pemerintah dalam Mengatasi Limbah Industri Pabrik Gula Tjoekir (Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang). *Jurnal Administrasi Publik*, 94-102.
- Meutia Nanda, A. F. (2023). Analisis TPS Sampah dan Dampaknya Bagi Lingkungan di Perumnas Mandala, Kab. Deli Serdang. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 2956-2961.
- Munandar, A. (2024). Implementasi Peraturan Bupati mengenai Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tekarang. *BELALEK: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Journal of Community Services)*, 87-96.
- Nor, A. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Di Desa Batang Kulur Tengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *Journal of Development Administrations Thinking Understand: Public and Business Administration (DATU)*, 38-44.
- Purtanto, P. (2023). Prinsip 3R: Solusi Efektif untuk Mengelola Sampah Rumah Tangga. *Innovative: Journal of Social Science Research*.
- Saputra, D. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kebijakan Pemerintah Berbasis Komunitas Untuk Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Kota Parepare. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Sidiq, M. A. (2020). Menjaga Kebersihan Lingkungan dengan Mengadakan Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Sampah di Dusun Timur Sawah Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh Lumajang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 42-58.
- Syahril Ramadhan, H. F. (2024). *Kebijakan Publik dan Pembangunan Berkelanjutan*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.